

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004
- Anwar, H.A.K. Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: Alumni, 1982.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Farid, H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi revisi 2008, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Cetakan ke-17, Jakarta: Djambatan, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Huda, Chairul. “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I, cet. 2 (rev), Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru Bandung, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Panggabean, Henry P. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruiki Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2001.
- Rijan, Yunirman dan Ira Koesoemawati. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Salindeho, John. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita. *Komentar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Sembiring, Edi Natasari. “Kewenangan Notaris Dalam Status Tersangka Menjalankan Tugas Sebagai Pejabat Umum Membuat Akta Otentik”, *Tesis*, Medan: Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 2006, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2006.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua puluh satu, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 14, Jakarta: Kencana, 2008.
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan ke-4 Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Tunggal, Hadi Setia. *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Jabatan Notaris*, Cetakan ke-1, Jakarta: Harvarindo, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850).

\_\_\_\_\_. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Lembaran Negara Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*

### **C. Makalah Seminar dan Tesis**

Butet Sriayu Madalena, “Kewajiban Notaris Dalam Merahasiakan Akta Notaris Dihubungkan Dengan Proses Peradilan Pidana”, *Tesis*, Jakarta : Universitas Pelita Harapan, 2015.

Hetty Roosmilawati, “Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Pelanggaran Jabatan Oleh Notaris Dalam Praktek di Jakarta Selatan”, *Tesis*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2008.

Reza Maulana Setiadi, “Akibat Hukum Bagi Profesi Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris/Undang-Undang Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya”, *Tesis*, Depok : Universitas Indonesia, 2011.

“Pelaksanaan Tugas Jabatan PPAT, Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Kaitannya dengan Pendaftaran Tanah”, Disampaikan dalam *Up Grading & Refreshing Course IPPAT*, Bandung, 27 Mei 2000.

### **D. Wawancara**

Wawancara bersama Dr. Lieke Lianadevi Tugali S.H., M.H., M.Kn, *Seorang Notaris di Jakarta dan PPAT dengan Wilayah Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat*, dilakukan pada tanggal 26 Juni 2015.

Wawancara bersama Ibu Maria Pranatia, *Seorang Notaris di Jakarta dan PPAT dengan Wilayah Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat*, dilakukan pada tanggal 30 Juni 2015.